

**COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH
DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

MUHAMMAD CANDRA SULAIMAN

NPP. 31.0865

*Asdaf Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si

Email : muhammadcandra931@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem that there are still many people in Palu City who dispose of waste not in the right place and according to the specified time resulting in a high volume of waste generation, the lack of facilities and infrastructure in handling waste, the existence of illegal landfills (TPS), the lack of waste banks and TPS3R. This requires collaboration involving the government, private sector and the community in handling waste problems in Palu City, Central Sulawesi Province. **Purpose :** This research aims to know and analyze collaborative governance in handling waste problems in Palu City, to know and analyze the supporting and inhibiting factors of collaborative governance in handling waste problems in Palu City, to know and analyze efforts to overcome the inhibiting factors of collaborative governance in handling waste problems in Palu City, Central Sulawesi Province. **Methods :** The research method used is qualitative research with descriptive methods and inductive approaches, the data collection techniques taken are interviews, observations and documentation. **Result/Fidings :** The obstacles that occur in the field regarding the collaboration carried out to handle waste problems in Palu City, Central Sulawesi Province are facilities and infrastructure such as waste transportation fleets, lack of public awareness about the importance of disposing of waste in its place, lack of budget to manage waste banks and TPS3R in Palu City. The theory used as an analysis knife in writing this thesis is to use the theory of collaborative governance from Anshell and Gash which explains that collaborative governance is seen from 4 aspects, namely starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. **Conclusion :** Based on the results of the study that Collaborative Governance in Handling Waste Problems in Palu City has been running well, but in the process there are still obstacles, namely the lack of budget, facilities and infrastructure and the government and the private sector have also made efforts to overcome these obstacles quite well.

Keywords: Collaboration, Waste Management, Stakeholder

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penulis berfokus pada permasalahan yaitu masih banyaknya masyarakat Kota Palu yang membuang sampah belum pada tempatnya dan sesuai dengan waktu yang ditentukan mengakibatkan tingginya volume timbulan sampah, masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan sampah, masih adanya tempat pembuangan sampah (TPS) liar, kurangnya bank sampah dan TPS3R. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanganan masalah sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *collaborative governance* dalam penanganan masalah sampah di Kota Palu, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat *collaborative governance* dalam penanganan masalah sampah di Kota Palu, untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya mengatasi faktor penghambat *collaborative governance* dalam penanganan masalah sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang diambil adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Hambatan yang terjadi dilapangan mengenai kolaborasi yang dilakukan untuk penanganan masalah sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah adalah fasilitas sarana dan prasarana seperti armada pengangkut sampah, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya, kurangnya anggaran untuk mengelola bank sampah dan TPS3R yang ada di Kota Palu. Adapun teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teori *collaborative Governance* dari Anshell dan Gash yang menjelaskan bahwa dalam *collaborative governance* dilihat dari 4 aspek yaitu starting condition (kondisi awal), institutional design (desain institusional), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif), dan *collaborative process* (proses kolaborasi). **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil penelitian bahwa *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Palu sudah berjalan dengan baik namun pada prosesnya masih ditemui hambatan yaitu kurangnya anggaran, sarana dan prasarana dan pemerintah bersama pihak swasta juga telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cukup baik.

Kata kunci : Kolaborasi, Penanganan Sampah, Pemangku Kepentingan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah “Collaborative Governance” mulai populer sejak awal tahun sembilan puluhan dan saat ini dianggap sebagai konsep yang sangat penting dalam upaya negara-negara untuk mencapai pemerintahan yang demokratis. Konsep ini menggantikan istilah yang lebih lama, yakni “Good Government”. (Eka et al., 2023) UNDP mendefinisikan “Governance” sebagai “penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan.” Dengan demikian, “Governance” memiliki tiga aspek utama (Addahlawi et al., 2019) Menurut (Andayani et al., 2023) menyatakan bahwa : sampah dianggap sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, mengotori, mengganggu, atau bahkan menjijikan. Dengan kata lain sampah merupakan barang buangan atau sisa dari hasil kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat berbentuk benda padat maupun benda semi padat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, kemajuan teknologi juga akan berkembang pesat. Perkembangan teknologi ini akan membawa kita menuju era di mana berbagai produk dapat

diproduksi secara buatan. Kemajuan teknologi ini juga akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat, yang cenderung menjadi lebih konsumtif dan mengandalkan produk-produk buatan karena ketersediaannya yang lebih mudah. Ketika produk-produk buatan tersebut sudah tidak terpakai, hal ini akan menghasilkan limbah yang sulit untuk terurai secara alami. Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa pertumbuhan populasi, perkembangan ekonomi, urbanisasi yang cepat, dan peningkatan standar hidup semuanya telah mempercepat masalah penumpukan sampah. Masalah sampah adalah salah satu permasalahan sosial yang tengah dihadapi di Indonesia. Data yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2022 menunjukkan bahwa produksi total sampah domestik mencapai 67,8 juta ton. Ini berarti setiap harinya, masyarakat menghasilkan sebanyak 185,753 ton, atau setara dengan 0,68 kilogram per individu dalam populasi sekitar 270 juta jiwa. Untuk menangani masalah ini, kerjasama dari berbagai pihak diperlukan, karena pengelolaan sampah yang efisien memerlukan partisipasi bersama. Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2008 tentang Penanganan Sampah, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan pengelolaan sampah yang berfokus pada pelestarian lingkungan, sambil memperkuat peran masyarakat dalam mengatasi masalah sampah sesuai dengan panduan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Governance lingkungan menekankan pentingnya memahami dan mengelola hubungan saling ketergantungan antara ekosistem dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengakui bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kota adalah mengelola lingkungan hidup, termasuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. (Fitri & Zuhroh, 2021) Isu seputar permasalahan sampah menjadi salah satu sorotan utama dalam lingkungan, dan sering kali menarik perhatian masyarakat. Ini bukan hanya masalah yang terbatas pada Indonesia, melainkan menjadi isu global yang serius, terutama di metropolitan besar. Meskipun berbagai negara maju telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, dampak positifnya masih belum terlihat dengan jelas. (Mumpuni & Kusumawati, 2021) Kolaborasi ketiga sektor tersebut menjadikan penyelenggaraan administrasi publik lebih berwarna, artinya beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat diakomodasi dan tidak semata-mata dimonopoli perannya oleh pemerintah. (Martomo, 2017). Maka dari itu pengelolaan sampah harus ditangani oleh banyak pihak dan perlu adanya kolaborasi dalam penyelesaiannya. Collaborative Governance merupakan respon dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang bersifat kompleks dibalik keterbatasan sumberdaya dan efisiensi anggaran. Collaborative Governance dianggap sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan masalah sosial yang kronis, merumuskan rencana pembangunan daerah untuk kebijakan penanganan sampah melalui kolaborasi antara pemangku kepentingan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penanganan sampah yang ada di Kota Palu masih sangat jauh dari harapan yang ditargetkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dimana data timbulan sampah mencapai 68,397.167.50 ton pada tahun 2022 sampahnya terdiri dari beragam aktivitas penduduk yang terpusat diberbagai lokasi pemukiman, komersial, fasilitas sosial, dan umum. Setiap lokasi penghasil sampah memiliki ciri khas sampah yang dihasilkan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Palu maka jumlah sampah yang dihasilkan juga meningkat. Pada tahun 2022 jumlah timbulan sampah perhari sebanyak 187,389.50 ton dan perbulannya mencapai 5,621,685.00 ton. Diperkirakan setiap orang di Kota Palu menghasilkan sekitar 2,83 liter sampah perhari, atau setara dengan 0,00283 kg/hari. Timbulan sampah yang

ditimbun pada setiap tempat pembuangan akhir yang sudah ada tentu saja seiring berjalannya waktu akan terjadi overload. Maka dari itu diperlukan juga bank sampah dan TPS3R agar masyarakat dapat mengeloah sampah rumah tangganya sendiri. Penanganan sampah di pusat perkotaan dengan luas daerah Kota Palu seluas 395,06 km² dengan berisikan jumlah penduduk sebanyak 374,779 jiwa yang mana jika dibandingkan dengan tenaga kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang berjumlah 180 orang personil tentu ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang angkanya mencapai ratusan ribu jiwa. Berdasarkan realisasi indikator kinerja dan realisasi anggaran, dari segi armada pengangkut sampah juga masih kurang seharusnya setiap kelurahan mempunyai satu armada sampah akan tetapi pada saat ini hal itu belum dimaksimalkan oleh Pemerintah. Dari segi program Pemerintah mengenai pengelolaan sampah belum tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan collaborative governance sebagai referensi atau perbandingan untuk dijadikan sebagai acuan. Evy Triani “Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Palangkaraya melakukan sebuah penelitian. Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa Kinerja Pelayanan persampahan di Kota Palangkaraya belum optimal. Timbulan sampah yang dihasilkan tidak seluruhnya dapat terangkut dan dikelola dengan baik khususnya di kecamatan dengan kepadatan yang tinggi yaitu Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya. Jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan volume sampah semakin bertambah tiap tahunnya. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana kinerja pengolahan sampah di Kota Palangkaraya yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu aspek yang kurang dalam penelitian ini adalah kondisi sarana dan prasarana persampahan yang ada saat ini dinilai masih kurang memadai seperti penggunaan bak sampah batu bata atau TPS batu bata yang sudah tidak dianjurkan lagi sehingga menyebabkan pengolahan sampah menjadi kurang efisien. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah di Kota Palangkaraya Merumuskan upaya optimalisasi kinerja layanan persampahan di Kota Palangkaraya (Trani, Evy, 2017). Skripsi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Prinsip Good Environmental Governance di Kota Klaten Pada tahun 2021, Dani Alifia Adi Setyarini melakukan penelitian mengenai isu serius yang berkaitan dengan manajemen sampah di Kota Klaten. Dalam studinya, peneliti tersebut berfokus pada pertanyaan seputar pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh pemerintah Kota Klaten dan sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Good Environmental Governance. Penelitian ini juga mencoba untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Klaten serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam hal ini (Alifa, Dani, 2021). Skripsi Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Pesawaran Oleh Muhammad Arizky Ramadany tahun 2023. Permasalahannya adalah Konsep tata kelola lingkungan dalam pengelolaan sampah. Peneliti tersebut dalam penelitiannya mengambil fokus permasalahan yaitu bagaimana Konsep tata Kelola lingkungan dalam pengelolaan sampah, faktor yang mempengaruhi Konsep Tata Kelola lingkungan dalam pengelolaan sampah dan upayanya. Skripsi Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang no. 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah dalam prespektif Good Environmental Governance (Rahmadany, Muhammad Arizky, 2023) Pada tahun 2016, Ik Muhayati melakukan penelitian tentang masalah pengelolaan sampah yang masih mengandalkan paradigma lama yang telah kehilangan efektivitasnya. Dalam penelitiannya, dia memusatkan

perhatian pada beberapa aspek, yaitu bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam mengelola sampah diimplementasikan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam pengelolaan sampah, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam konteks ini (Mulyati, Ik, 2016). Skripsi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kota Tana Tidung Oleh Paramita Adhinul Putera tahun 2016. Permasalahannya adalah kebijakan pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan efektif. Peneliti tersebut dalam penelitiannya mengambil fokus permasalahan yaitu bagaimana kebijakan pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan efektif, faktor yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan sampah yang berjalan dengan efektif dan upayanya (Putera, Pramita Adhinul, 2016).

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam kedua penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan juga terdapat perbedaan hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab 4. Peneliti ingin menjadikan lima penelitian ini sebagai penguat penelitian yang akan dilakukan dalam Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Karena penelitian tersebut dapat menjadi cerminan untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Pau Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebutuhan yang diterapkan untuk penelitian yang akan dilakukan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor pengambat Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

Menurut Fernandes Simangunsong (2017:231), data yang didapat dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata bukan angka yang diperoleh dari hasil dari wawancara dan didukung dengan catatan dari hasil lapangan, dokumentasi, rekaman, dan pendukung lainnya. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menafsirkan kedalam analisis dan perumusan terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Sehingga dengan begitu hasil yang telah diperoleh akan diolah menjadi suatu laporan penulisan dalam bentuk kata, hal tersebut akan menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan gambaran yang telah terusun secara teratur, faktual dan tepat sesuai dengan keadaan, kemudian dapat ditarik kesimpulan atau pemecahan masalah yang bersifat umum mengenai Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun

informan dalam penelitian adalah Walikota Palu, Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Kepala Satpol PP Kota Palu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Camat Mantikulore, Lurah Talise, Camat Tawaeli, Lurah Pantoloan, Petugas Pengangkut Sampah, Direktur PT. Citra Palu Mineral, dan Tokoh-tokoh

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan teori dari Ansel dan Gash dalam (Islamy, 2018). Teori tersebut memiliki 4 indikator dalam mengukur collaborative governance yaitu starting condition (kondisi awal), institusional design (desain institusional), facilitative leadership (kepemimpinan fasilitatif), collaborative process (proses kolaborasi). Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut:

3.1 Starting Condition (kondisi awal)

Kondisi awal merupakan dimana suatu kondisi aituasi antara pemangku kepentingan dengan lembaga lainnya berangkat dari kondisi yang berbeda pada awal ini. Dalam kondisi awal pada teori ini menjelaskan berupa sumber daya dan pengetahuan, insentif dan konflik yang ada. Tahap ini mengatur tingkat kepercayaan, konflik dan saling menghormati satu sama lain. Kondisi awal dalam penanganan sampah di Kota Palu menggambarkan masih terdapat kurangnya koordinasi antar pihak, kurang optimalnya proses pengolahan sampah khususnya pengangkutan sampah masih mengalami kekurangan karena faktor masyarakat yang kurang memahami arahan dari pemerintah, juga kurangnya armada dan petugas kebersihan, meskipun anggaran yang disediakan oleh pemerintah telah mencapai miliaran tetapi itu masih belum memenuhi target dalam penanganan sampah diantaranya menyediakan mobil pengangkut sampah pada setiap kelurahan yang ada di Kota Palu, juga digunakan dalam membuat dan meningkatkan Bank Sampah yang ada dan TPS3R agar penanganan sampah bisa mencapai target yang diharapkan, serta masih banyak titik tempat pembuangan ilegal yang ada di beberapa sektor di tengah kota.

3.2 Institusional Design (desain institusional)

Desain institusional dalam memperhatikan protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk legitimasi prosedural dan proses kolaboratif. Penyelenggaraannya harus bersifat terbuka dan inklusif agar setiap kelompok merasa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Desain institusional yang ada berupa partisipasi forum, aturan, transparansi, dan forum terbatas. Bahwasanya masih ditemukan kurang optimalnya partisipasi yang berlangsung dalam pengolahan sampah di Kota Palu walaupun sudah ada beberapa partisipasi kolaborasi antara Dinas, Sawata dan masyarakat dalam mengelolanya, akan tetapi sudah adanya forum terbatas mulai dari sektor masyarakat maupun pihak swasta yang menjadi forum terbatas dalam penanganan masalah sampah di Kota Palu. Pada indikator aturan yang mengatur penanganan sampah di Kota Palu sudah jelas diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, dan perwali nomor 37 tahun 2017 tentang penyelenggaraan kebersihan.. ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi pemerintah agar bagaimana mengimplementasikan kebijakan ini dimasyarakat. Dalam aspek transparansi pemerintah sudah mulai terbuka dalam melaksanakan pengelolaan sampah melalui adanya aplikasi yang dibuat oleh pemerintah yaitu website

PAKAGALI meskipun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan website tersebut tapi dalam hal ini pemerintah Kota Palu akan terus meningkatkan aplikasi ini.

3.3 Facilitative Leadership (kepemimpinan fasilitatif)

Aspek kepemimpinan merupakan unsur penting dalam mengantar pemangku kepentingan yang berkolaborasi ke dalam perundingan dan negosiasi untuk mengintegrasikan para pemangku kepentingan dan menyatukan ketiga aspek dalam semangat kolaboratif. Pada sub tema ini menjelaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif yang ada di Kota Palu dalam menangani masalah sampah sudah paham dan saling menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang sudah diberikan pemerintah kepada tiap pemangku kepentingan. Diantaranya memiliki sifat pemahaman memahami konteks dari masing-masing stakeholders yang ada berkaitan dengan penanganan sampah sudah mencapai kriteria dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menangani sampah, memiliki kompetensi teknis rasional yang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup memainkan perannya sebagai perpanjangan tangan dari Bapak Walikota untuk membagi tugas pada tiap-tiap bidang yang ada dan memiliki karakteristik pribadi yang sadar akan tanggung jawabnya sendiri hanya saja pasti masih ada pihak yang tidak sadar mengenai penanganan sampahnya sendiri.

3.4 Collaborative Process (proses kolaborasi)

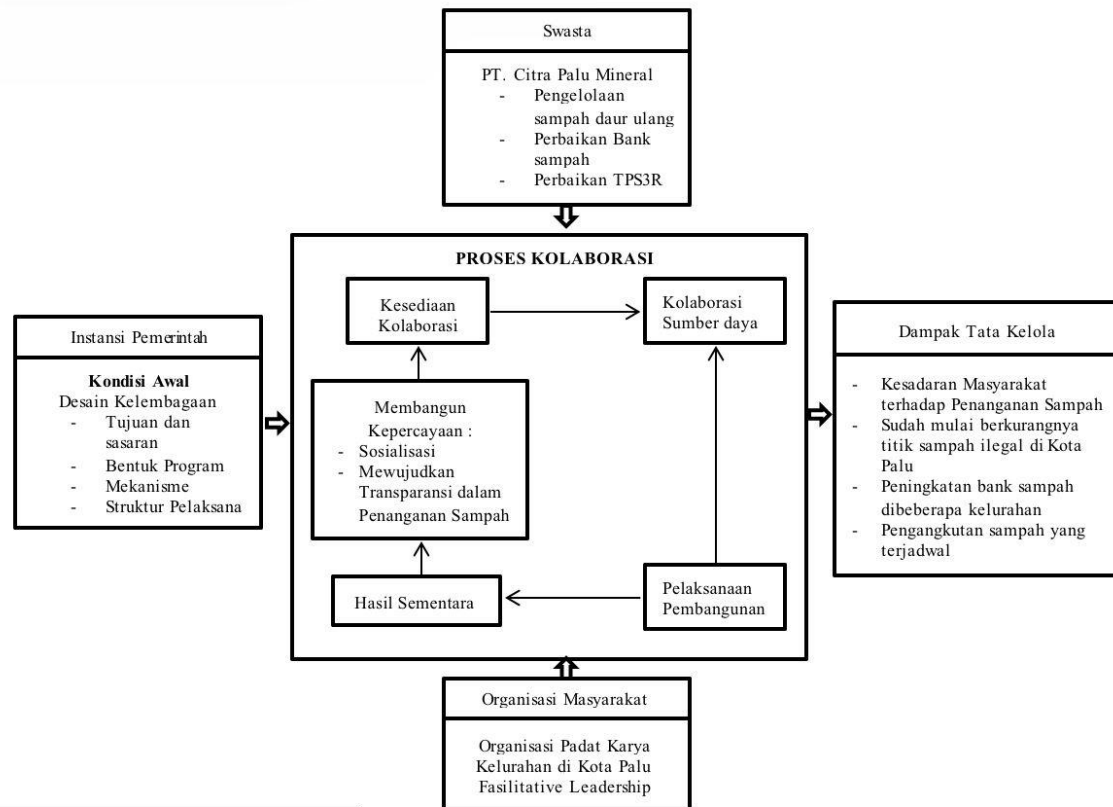
Proses kolaborasi merupakan inti dari model kolaborasi. Proses kolaborasi digambarkan sebagai tahap pengembangan kesepakatan yang menjelaskan bagaimana fase-fase program yang dilaksanakan. Proses kolaborasi adalah proses yang membahas mengenai bagaimana dialog yang dilakukan dengan partisipasi pemangku kepentingan untuk mendapatkan keputusan yang disepakati bersama. Kolaborasi bergantung pada bagaimana siklus kolaborasi itu berputar mulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Dari hasil pengamatan menjelaskan sudah ada dialog tatap muka yang dilakukan terhadap Dinas Lingkungan dengan Pihak Swasta dan sering menjalani kolaborasi dalam bentuk penerapan pengelolaan sampah daur ulang dengan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Palu dan dalam pelaksanaan kolaborasi masing-masing dari pemegang kepentingan antara dinas dan pihak swasta telah membangun kepercayaan dengan harapannya dapat berjalan dengan baik dalam hal membangun suatu hubungan. Begitu juga dengan para pemangku kepentingan sudah paham akan pemahaman dalam menjalani suatu kolaborasi dibutuhkan kepastian bersama guna terwujudnya suatu tujuan bersama. Pelaksanaan pada hasil sementara sudah ada walaupun belum jangkauan besar akan tetapi dalam setiap pelaksanaan pasti akan menjadi evaluasi yang menjadikan hasil dari berikutnya lebih baik dan harapannya masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanganan jika ada sampah, Dinas Lingkungan Hidup memiliki URC agar penanganan sampahnya dapat cepat dan tepat.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan dengan tepat sasaran dan masih belum sesuai dengan pelaksanaan kolaborasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal yang diharapkan. Kolaborasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu bersama dengan pihak swasta dan masyarakat yang terkait sebenarnya belum dengan baik dan sempurna, upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam melaksanakan kolaborasi dalam penanganan masalah sampah yang ada tentu tidak akan lepas dari sedikit banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi yaitu seperti penerapan dalam pengelolaan sampah yang belum optimal dalam

penanganan sampah yang belum mencapai tujuan, yaitu bekurangnya volume sampah, kurang personil pegawai maupun tenaga kebersihan, masih banyaknya rasio tempat pembuangan sampah ilegal yang mengakibatkan kurang pedulinya masyarakat dalam mengelola sampah, kurangnya armada pengangkut sampah yang tersebar disetiap kelurahan yang mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa kelurahan sehingga tidak terkelola dengan baik serta realisasi anggaran yang belum efisien dalam program pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut dengan mencari jalan keluar dan solusi yang baik dengan menyesuaikan pada permasalahan yang ada agar berjalannya pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan prosedur. Upaya tidak langsungnya adalah dengan meningkatkan kolaborasi dengan pihak ketiga dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui perangkat daerah agar tercapainya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Gambar 1.
Bentuk Collaborative Governance Dalam Penanganan Sampah di Kota Palu



Sumber : Diolah oleh Penulis 2024

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sudah ada dan sudah berjalan namun belum mencapai tujuan utama dan belum berjalans secara maksimal. Masih terdapatnya kurangnya koordinasi

antar pihak, kurang optimalnya personel pengelolaan sampah khususnya pengangkutan sampah masih mengalami kekurangan karena faktor kurangnya armada, dan petugas kebersihan, serta masih banyak titik tempat pembuangan sampah ilegal yang ada. Masih ditemukan kurang optimalnya partisipasi yang berlangsung dalam penyelesaian masalah sampah di Kota Palu walaupun sudah ada beberapa partisipasi kolaborasi antara Dinas, pihak Swasta dan masyarakat dalam mengelolanya. Faktor pendukung dan penghambat proses collaborative berasal dari internal dan eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat ialah lebih mengoptimalkan keterlibatan pihak ketiga dalam penanganan sampah agar berjalan dengan efektif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Pemerintah Kota Palu sebagai metode studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Ansel dan Gash dalam Islamy.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Bapak Wali Kota Palu dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu beserta pihak terkait yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian penulis yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mengsucceskan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A. dan Hidayatullah, A. F. 2020. Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*. 8(2), 106 - 118.
- Adi Setyarini, Dani Alifa. (2021). Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Prinsip Good Environmental Governance di Kota Klaten
- Andayani Sri, Fathimatus Zahra, Wahyu Musafikah, Mariyatul Qibtiyah. Pengadaan Bank Sampah Sebagai Strategi Pengelolaan Sampah Di Desa Tamansari Kabupate Probolinggo. *Communnity Development Journal*. Universitas Panca Marga.
- Cahyaning Fitri, Icha. Fatimatul Zuhroh, Siti. 2021. Penerapan Prinsip Good enviromental governance sesuai dengan peraturan daerah kota banyuwangi nomor 9 tahun 2013. vol. 19(1)
- Islamy, H. La Ode Syaiful. 2018. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Baubau: Deepublish
- Martomo, Y. P. (2017). COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI BASIS PENGELOLAAN PUBLIC AFFAIRS. Yuma Pustaka.
- Muhayati, Ik. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang no. 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah dalam prespektif Good Enviromental Governance.
- Putera, Paramita Adhinul. (2016). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kota Tana Tidung.

Ramadhany, Muhammad Arizky. (2023). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Pesawaran

Retno Mumpuni ,Niken Wahyuning. Prabaningrum , Mustika. 2021. Good Governance pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup. 12(1), 79-89.

Setiawandari, Eka Putri. Kriswibowo, Artimurti. 2023. Collavorative Governance dalam Pengelolaan Sampah. Jurnal Kebijakan Publik. UPN Veteran Jawa Timur.

Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung : Alfabeta.

Triany, Evy. (2017). Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Palangkaraya.

